



PENJENJANGAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUMBAWA



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dokumen Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tahun 2021-2026, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk memberikan langkah untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja ini merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam perencanaan kinerja tahun 2023.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta memberikan dukungan, bimbingan dan masukan terhadap kesempurnaan penyusunan dokumen penjenjangan dan mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi bahan untuk dijadikan sandaran dalam proses penyusunan perencanaan kinerja dalam penyusunan penyelarasan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.

Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih

Sumbawa Besar, 20 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Sumbawa



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II POHON KINERJA DAN MODEL LOGIS	5
BAB III TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA	9
BAB IV MENUANGKAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN	17
BAB V PENUTUP	37

BAB I PENDAHULUAN

Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan isu penting terutama yang terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah. Beberapa isu strategis terkait penjenjangan dan penyelarasan kinerja instansi pemerintah, antara lain:

- a. Sebagian Indikator pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak dilaporkan instansi pemerintah terkait;
- b. Program/kegiatan belum dapat mengungkit capaian kinerja instansi pemerintah dan kinerja pembangunan *Collaborative Working* dan pengelolaan kinerja yang bersifat lintas sektor tidak terdesain sejak perencanaan;
- c. Capaian kinerja pembangunan instansi pemerintah relatif *stagnan*, bahkan turun, namun Nilai Kinerja Individu (SKP) tinggi; dan
- d. Ukuran kinerja tingkat instansi pemerintah dan unit kerja masih ada yang berorientasi pada proses dan output saja.

Sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang simultan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, penjenjangan dan penyelarasan kinerja telah menggunakan metode *Cascading* dan *Alignment* mengadopsi sistem pengelolaan kinerja pada Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 467/KMK.01/2014. *Cascading* atau Penurunan, yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Sementara itu, Penyelarasan Kinerja Instansi Pemerintah sebelumnya menggunakan metode

alignment atau penyelarasan yaitu sebuah proses penyelarasan SS, IKU, dan/atau target IKU secara horizontal antar unit/pegawai yang selevel.

Pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh Diskominfotiksan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan upaya mengefektifkan strategi yang telah ditentukan. Implementasi strategi akan lebih efektif apabila seluruh unit/pegawai melakukan penyelarasan SS, IKU dan target dengan strategi organisasi baik secara vertical maupun horizontal. Pada dasarnya, *cascading* SS dan IKU harus dilakukan secara hierarkis sesuai dengan level pengelolaan kinerja di suatu organisasi. Namun, *cascading* dapat dilakukan tidak secara hierarkis karena struktur organisasi. Cascading IKU harus memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit/pegawai sehingga IKU tidak selalu di-*cascade* (diturunkan) hingga level pelaksana.

Pada perkembangannya, sejalan dengan sejumlah isu yang disampaikan di atas sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Kebijakan dalam bentuk regulasi tersebut ditetapkan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, diperlukan tata cara penilaian atau cara menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Penjenjangan Kinerja sebagai suatu proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang

telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Objek dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah seluruh Instansi Pemerintah, yang mencakup seluruh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah Daerah. Penjenjangan Kinerja dalam Peraturan Menteri tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Instansi Pemerintah dalam menyusun Penjenjangan Kinerja guna mendukung pencapaian Kinerja organisasi. Tahapan dari Penjenjangan Kinerja, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu: menentukan Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja; menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*); menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional; merumuskan Indikator Kinerja; dan menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan.

Penjenjangan Kinerja dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu: untuk mampu menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan individu Dengan baik; Memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, dan individu; Mampu menetapkan program, kegiatan secara fokus dan tepat; Mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan tujuan tersebut, maka hasil yang diharapkan dari penjenjangan kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah adalah dapat digunakan untuk:

- a. menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu; penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;

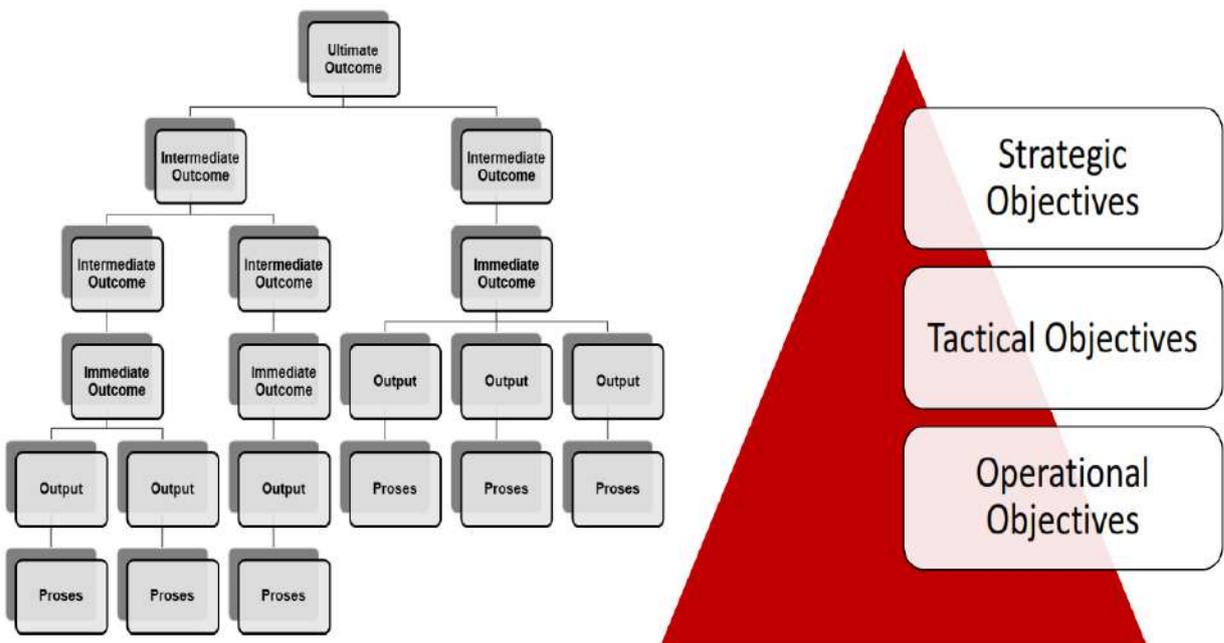
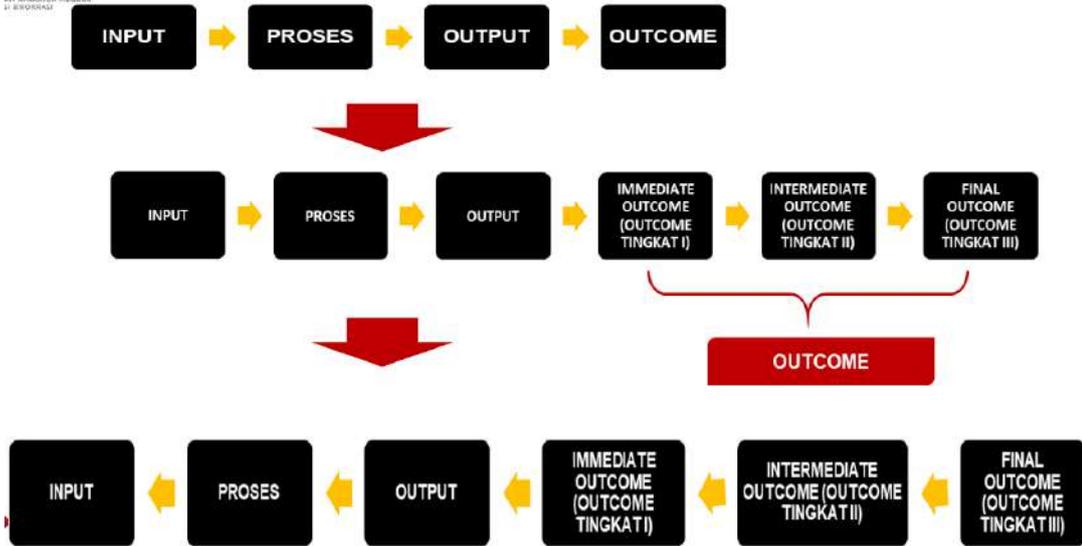
- b. penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat; penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
- c. dan penataan struktur organisasi.

BAB II POHON KINERJA DAN MODEL LOGIS

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Penjenjangan Kinerja berkaitan erat dengan penyusunan pohon kinerja yang terdiri atas beberapa model logis. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Pohon Kinerja, antara lain:

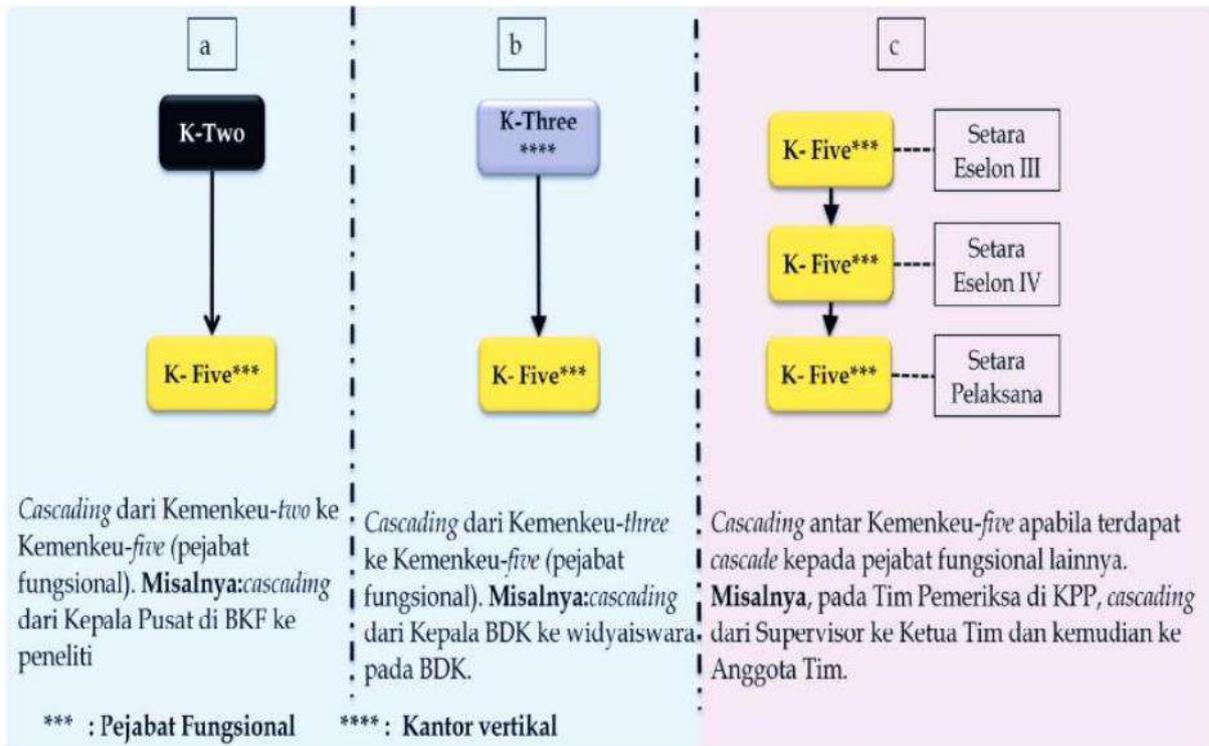


Model logis atau *Logic Model* mutlak diperlukan dalam penyusunan pohon kinerja, karena model logis tersebut akan membantu instansi pemerintah dalam menjenjangkan kinerja organisasi sehingga akan mendapatkan kinerja yang lebih operasional hingga mendapatkan proses/aktivitas yang tepat dan berdampak bagi kinerja organisasi. Model Logis yang rekomendasikan, sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar: Model Logis dalam Penjenjangan Kinerja

Memperhatikan Keputusan Menteri keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, *Cascading* pada pejabat fungsional pada lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan metode sebagaimana pada gambar berikut:



Cascading IKU pada pejabat fungsional.

Penjelasan:

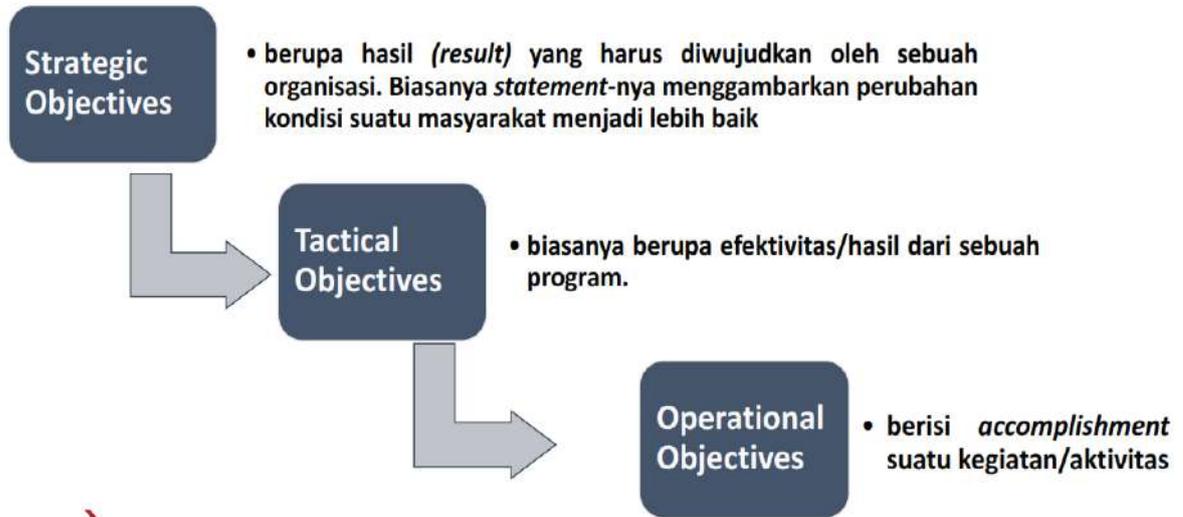
1. Pejabat fungsional yang tidak perlu melakukan *cascade* kepada pejabat fungsional lainnya, sehingga *cascading* dapat dilakukan dengan mekanisme kolom a dan b pada gambar di bawah, dengan ketentuan:
 - a. Level tanggung jawab pejabat fungsional tidak dapat dibedakan;
 - b. Tidak ada fungsi supervisi pada pejabat fungsional di level yang lebih tinggi kepada pejabat fungsional yang lebih rendah.
2. Pejabat fungsional yang melakukan *cascade* kepada pejabat fungsional lainnya, sehingga *cascading* dapat dilakukan dengan mekanisme kolom c pada gambar di bawah, dengan ketentuan:
 - a. Level jabatan fungsional dapat disetarakan dengan level jabatan structural tertentu;

- b. Tiap level jabatan fungsional tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara berjenjang;
- c. Terdapat fungsi supervisi secara berjenjang pada pejabat fungsional di level yang lebih tinggi kepada pejabat fungsional yang lebih rendah

BAB III TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA

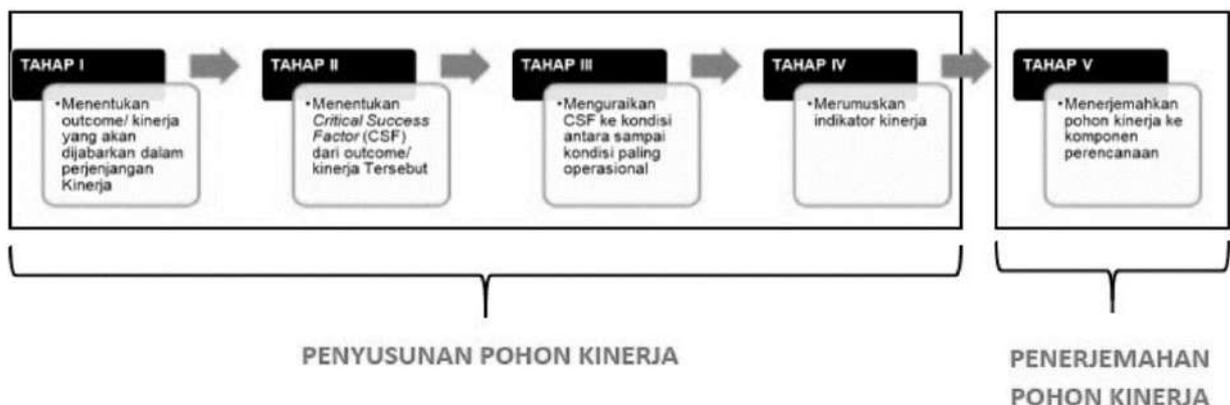
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Hirarki Sasaran dalam Penjenjangan Kinerja tergambar berikut di bawah ini:

A. Hirarki Sasaran Penjenjangan Kinerja



B. Tahapan Penjenjangan Kinerja

Berdasarkan hirarki penjenjangan di atas, maka alur atau tahapan dalam proses penjenjangan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Penjelasan Penjenjangan Kinerja

Penjelasan gambar:

1. Menentukan *Outcome*/Kinerja yang akan dijabarkan;
2. Mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) atau faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan. CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka *outcome*/hasil berpotensi besar untuk tercapai. Penentuan CSF dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar benar terjadi (*factual problem*);
 - b. Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai *outcome*/kinerja di masa yang akan datang (antisipatif);
 - c. Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan;
 - d. Identifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat urusan; dan
 - e. Pastikan CSF merupakan “sebab” atau “cara” dan kinerja/*outcome* adalah “akibat” atau “hasil” nya.

Proses penentuan atau pengidentifikasian CSF memiliki 2 (dua) metode, yaitu:

Metode 1: Mencari CSF dengan Mencari Faktor Pembentuk

1. Identifikasi Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian *Outcome*, dengan menjawab:
 - a. Apa saja yang harus ada/diperlukan agar *outcome*/kinerja tercapai?
 - b. Bagaimana agar kinerja/*outcome* terwujud?
 - c. Apa kondisi/prasyarat yang harus ada agar *outcome* terealisasi?
2. Bisa menggunakan perspektif manajemen lainnya dalam mencari faktor pembentuk, misal: *Balanced scorecard*, proses bisnis, dll.

Metode 2: Mencari CSF dengan Mengurai Masalah/Penyebab:

1. Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya isu/permasalahan strategis, dan kondisi yang diperlukan untuk mengatasi penyebab isu/permasalahan
2. Dianjurkan untuk mendapatkan CSF melalui diskusi, brainstorming, meminta pendapat para ahli, serta mengambil teori-teori yang relevan

Contoh CSF: Tingginya Kemacetan (dengan pendekatan masalah/factor Penyebab), contoh tabel:

Faktor Penyebab	Kondisi Yang Diperlukan
Over Kapasitas Jalan	Meningkatnya kapasitas jalan
Pelanggaran oleh pengemudi kendaraan	Menurunnya pelanggaran berlalu lintas
Jalan rusak	Meningkatnya kualitas permukaan jalan
Parkir sembarangan dan tidak sesuai aturan	Berkurangnya parkir liar
Tata kota tidak sesuai peruntukan	Terciptanya penataan kota yang baik

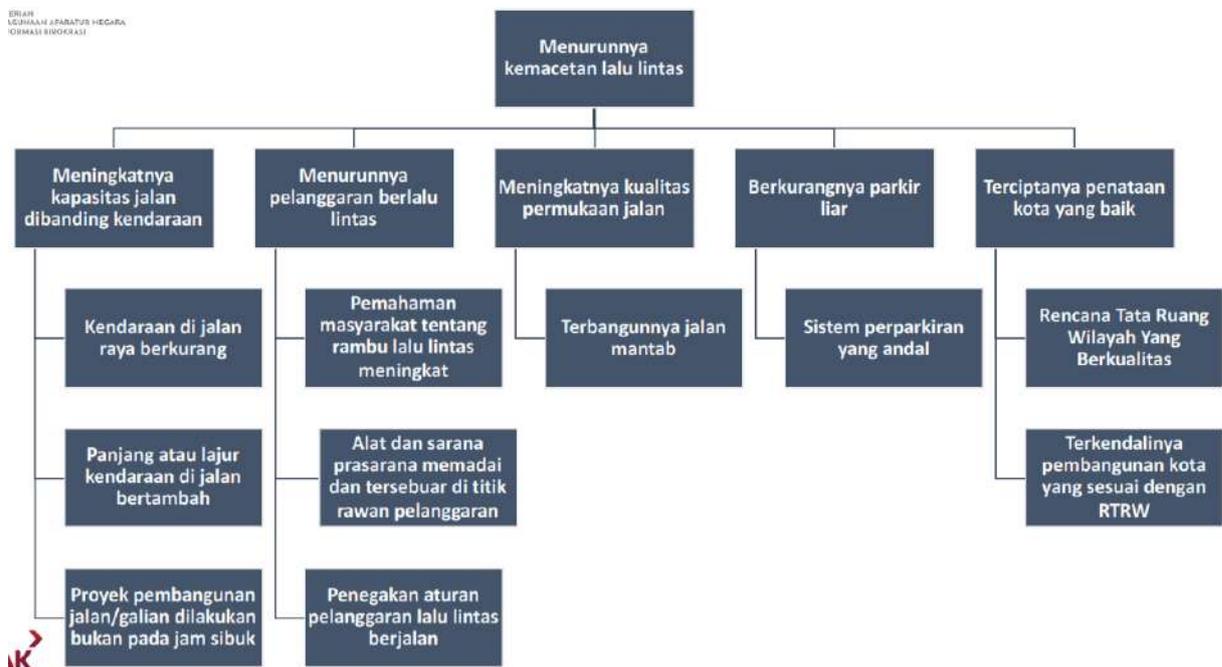
Contoh CSF PADA OUTCOME MENURUNNYA KEMACETAN LALU LINTAS



3. Mengurai *Critical Success Factor* (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Ke Kondisi Operasional “kondisi apa yang diperlukan agar CSF dapat terwujud?”

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya kapasitas jalan dibanding kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan di jalan raya berkurang • Panjang atau lajur kendaraan di jalan bertambah • Proyek pembangunan jalan/galian dilakukan bukan pada jam sibuk
Menurunnya pelanggaran berlalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman masyarakat tentang rambu lalu lintas meningkat • Alat dan sarana prasarana memadai dan tersebar di titik rawan pelanggaran • Penegakan aturan pelanggaran lalu lintas berjalan • DII
Meningkatnya kualitas permukaan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya jalan mantab • DII
Berkurangnya parkir liar	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem perparkiran yang andal • DII
Terciptanya penataan kota yang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas • Terkendalinya pembangunan kota yang sesuai dengan RTRW • DII

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, maka bentuk Pohon Kinerja yang disusun berdasarkan CSF adalah seperti pada gambar dibawah:



D. Prinsip Teknis Penyusunan Penjenjangan Kinerja

Sejumlah Prinsip-prinsip Teknis yang harus diperhatikan dalam proses Penyusunan:

- a. Tidak dihubungkan dulu dengan komponen perencanaan (tidak dari awal sudah diberi nama visi, misi, tujuan, sasaran daerah, program, sasaran, program, kegiatan, dan sasaran kegiatan);
- b. Tidak dihubungkan dulu dengan hierarki organisasi (tidak dari awal sudah diatribusikan untuk jenis/bidang tugas dari instansi pemerintah tertentu, jenjang jabatan tertentu (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan/atau eselon 4);
- c. Tidak dihubungkan dulu dengan eksisting struktur organisasi (tidak dari awal diarahkan kepada unit kerja yang ada);
- d. Tidak dihubungkan dulu dengan eksisting program/kegiatan (tidak dari awal diarahkan kepada program/kegiatan yang ada);
- e. Tidak dihubungkan dulu dengan nomenklatur program/kegiatan (tidak dari awal sudah menggunakan nomenklatur program/kegiatan yang ditetapkan oleh Sistem/Aplikasi);
- f. Tidak dihubungkan dulu dengan eksisting anggaran (tidak dari awal sudah dicocokkan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA/DPA).

E. Pohon Kinerja

Berdasarkan uraian di atas, maka pohon kinerja pada lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

POHON PERJENJANGAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023

PERMASALAHAN PELAYANAN/ PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI PD	ISU STRATEGIS	OUTCOME YANG DIHARAPKAN
<p>Layanan prasarana pendukung pemanfaatan TIK belum merata</p> <p>Layanan prasarana pendukung pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum merata</p> <p>Pemanfaatan TIK masih belum optimal, baik di sektor pemerintahan maupun sektor perekonomian</p> <p>Data statistik sektoral pada perangkat daerah tidak terkompilasi sesuai standar</p>	<p>Belum optimalnya kualitas layanan informatika dan Informasi Publik</p>	<p>Meningkatnya kualitas layanan informatika dan Informasi Publik</p> <p><u>Indikator pencapaian :</u></p> <p>1. Indeks kepuasan kualitas layanan informatika dan komunikasi publik</p>
<p>Ketersediaan data statistik sektoral yang termutakhirkan masih rendah</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral terstandar</p> <p>Infrastruktur data terintegrasi antar perangkat daerah belum tersedia</p>	<p>Belum optimalnya kualitas pengelolaan data statistik daerah</p>	<p>Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik daerah</p> <p><u>Indikator pencapaian :</u></p> <p>Persentase data statistik sektoral daerah sesuai standar data</p>
<p>Kualitas tenaga SDM persandian belum memadai</p> <p>Sarana prasarana persandian yang memenuhi standar masih kurang</p> <p>Belum terdapat tenaga fungsional persandian daerah kabupaten</p>	<p>Belum terpenuhinya standar keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa</p>	<p>Terpenuhinya standar keamanan informasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa</p> <p><u>Indikator pencapaian :</u></p> <p>Indeks pemenuhan standar keamanan informasi</p>
<p>Tata Kelola SAKIP OPD masih kurang</p>	<p>Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum optimal</p>	<p>Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Diskominfo Sumbawa</p> <p><u>Indikator pencapaian :</u></p> <p>Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Diskominfo Sumbawa</p>

Outcome 01

Meningkatnya kualitas layanan informatika dan komunikasi publik

Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara on-line dan terintegrasi

Peningkatan pemanfaatan domain dan subdomain pemerintah dan Perangkat daerah yang memiliki portal, situs web yang sesuai standar

Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government Kabupaten/Kota

Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah

Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah

Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan Dinas

Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas dengan Memanfaatkan jaringan intra pem

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Tersedianya sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data

Meningkatnya data yang dapat berbagi

Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Meningkatnya perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus

Meningkatnya layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum

Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penhubung layanan

Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City

Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah

Meningkatnya coverage area sasaran informasi publik untuk kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah

Meningkatnya kanal dan sumberdaya penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah

Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Tersedianya Pelayanan Informasi Publik

Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi

Outcome 02

Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik

Meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan

Meningkatnya basis data dan kapasitas penyelenggaraan statistik sektoral

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan

Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan

Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah

Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral yang Terintegrasi

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Jumlah survey statistik sektoral rekomendasi BPS

Jumlah kompilasi statistik sektoral rekomendasi BPS

Outcome 03

Terpenuhinya standar keamanan informasi

meningkatnya keamanan informasi pemerintah

meningkatnya pengamanan titik dengan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)

Meningkatnya pengamanan kegiatan strategis dan sistem elektronik

meningkatnya pengamanan titik dengan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)

Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi

Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya

Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah

Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kotayang

Outcome 04

Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja

Meningkatnya nilai AKIP Diskominfoteksan

Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Tersedianya dokumen adm. keuangan OPD

Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah OPD

Tersedianya dokumen admin.kepegawaian OPD

Tersedianya dokumen adm. umum OPD

Tersedianya dokumen jasa penunjang urusan OPD

Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD Penunjang Urusan OPD

Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya RKBMD SKPD

Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Tersedianya Peralatan dan Perleng Kantor

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koord Peny Dok RKA-SKPD

Tersedianya Admn Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi

Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Peny. Dok Perubahan RKA-SKPD

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Terlaksananya BMD pada SKPD

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Lap Hasil Koord. Peny Dokumen DPA- SKPD

Tersedianya Dok Bhn Tanggapan Pemeriksaan dan TL Pemeriksaan

Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Asst Tetap Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Asst Tetap Lainnya

Tersedianya Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koord Peny Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Dok Bhn Tanggapan Pemeriksaan dan TL Pemeriksaan

Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Asst Tetap Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Asst Tetap Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Asst Tetap Lainnya

Tersedianya Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Peny Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

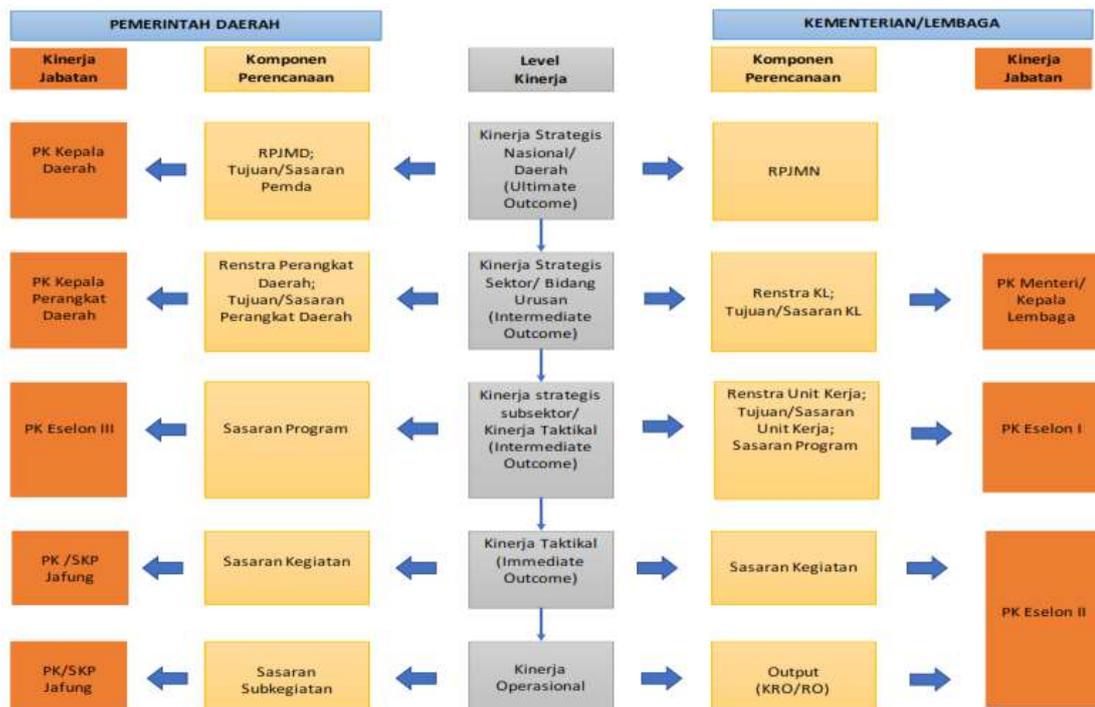
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV MENUANGKAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

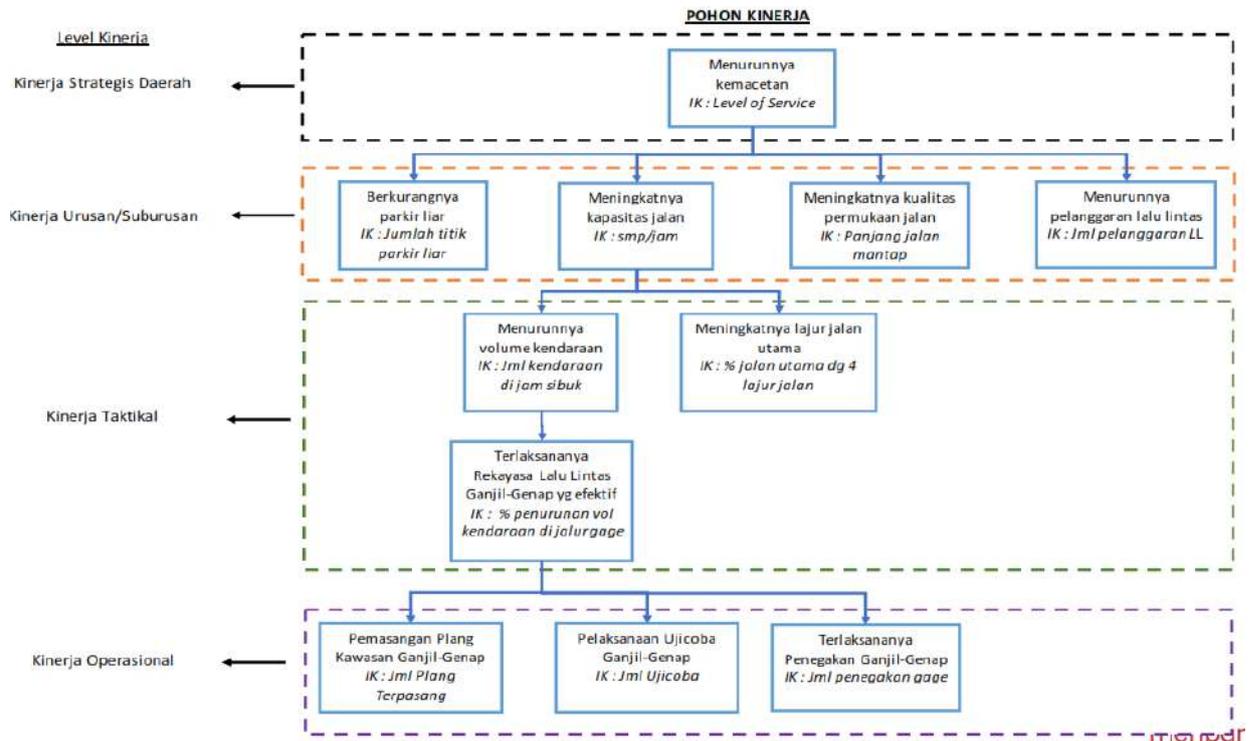
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Keputusan Menteri keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka tahapan penguangan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan di lingkungan Diskominfotiksan Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan proses yang terdiri atas beberapa Langkah, yaitu:

1. Mengklasifikasi Level Kinerja (Strategis, Taktikal, Operasional)
2. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap Jabatan Kementerian/Lembaga
3. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap Jabatan Pemerintah Daerah

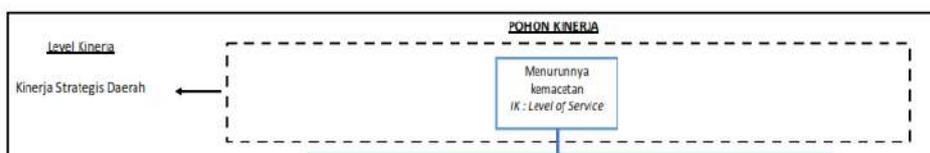
Tahapan di atas dapat gambarkan dalam skema dibawah ini:



Berdasarkan skema di atas, maka selanjutnya adalah melakukan klasifikasi terhadap level kinerja pemerintah Daerah, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan klasifikasi terhadap level kinerja pemerintah Daerah, maka selanjutnya adalah menetapkan kinerja strategis daerah sebagai tujuan Dan sasaran dalam perencanaan strategis perangkat daerah dan ukuran kinerja perangkat daerah, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



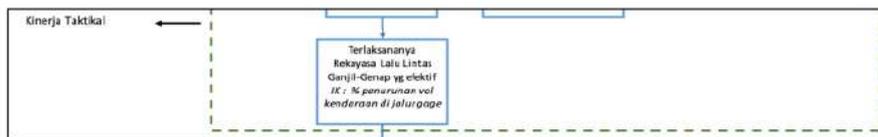
<u>Tujuan</u>	<u>Indikator Tujuan</u>	<u>Target</u>				
1. Meningkatnya Kemacetan	Level Of Service	X5				
<u>Sasaran Strategis</u>	<u>Indikator Sasaran</u>	n.I	n.II	n.III	n.IV	n.V
1. Menurunnya Kemacetan	Level of service	X1	X2	X3	X4	X5

Setelah menetapkan kinerja strategis daerah sebagai tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis pemerintah daerah dan ukuran kinerja kepala daerah, langkah selanjutnya adalah menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan kinerja Eselon III/pejabat administrator, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



Nama Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kepmendagri 50)
Sasaran Program	Menurunnya Volume Kendaraan
Indikator Program	Rata2 Jumlah kendaraan di jam sibuk
Target Program	xxx

Setelah menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan kinerja Eselon III/pejabat administrator, tahap berikutnya adalah menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran kegiatan dan/atau kinerja Eselon IV/pejabat pengawas/pejabat fungsional, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



Nama Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Kepmendagri 50)
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Rekayasa Lalu Lintas Ganjil Genap yang Efektif
Indikator Kegiatan	% penurunan vol kendaraan di jalur gage
Target Kegiatan	xxx

Setelah menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran kegiatan dan/atau kinerja Eselon IV/pejabat pengawas/pejabat fungsional, tahap berikutnya adalah menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran subkegiatan dan kinerja jabatan fungsional, seperti contoh pada gambar di bawah ini:



Nama SubKegiatan	
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Keptmendagri 50)	
Sasaran SubKegiatan	Terlaksananya Pemasangan Plang Kawasan Ganjil-Genap (Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)
Indikator SubKegiatan	Jumlah Plang gage Terpasang (Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan)
Target SubKegiatan	Xxx
Anggaran	Rp -

Berdasarkan standar proses di atas, maka penuangan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan di lingkungan Diskominfotiksan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

A. Klasifikasi Terhadap Level Kinerja Diskominfotiksan Kabupaten Sumbawa

Tabel 1. Kinerja Strategis dan Kinerja Urusan/ Sub Urusan

Kinerja Urusan/ Sub Urusan			Kinerja Taktikal			Kinerja Operasional		
1	Meningkatnya kualitas layanan informatika dan komunikasi publik	IK: Peningkatan indeks kepuasan kualitas layanan informatika dan komunikasi publik	1	Meningkatnya kualitas masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	IK: Peningkatan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan Pemda	1	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika	IK: Indeks kualitas layanan informasi dan komunikasi publik
			2	Meningkatnya kualitas layanan publik secara on-line	IK: Peningkatan persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on-line dan terintegrasi	1	Meningkatnya kualitas pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda kabupaten	IK: Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfotiksan
					IK: Peningkatan persentase jumlah OPD yang terhubung dengan aplikasi internet yang dikelola PD Penyelenggara Sub Urusan Kominfotiksan	2	Meningkatnya pengelolaan e-government di lingkup Pemkab	IK: Jumlah sumber daya teknologi informatika dan layanan e-government oleh OPD
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik daerah	IK: Peningkatan persentase data statistik sektoral daerah sesuai standar data	1	Meningkatnya kualitas data sesuai metadata statistik sektoral	IK: Peningkatan persentase data sesuai metadata statistik sektoral	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten	IK: Persentase basis data statistik daerah yang terintegrasi sesuai standar data
3	Terpenuhinya standar keamanan informasi	IK: Indeks pemenuhan standar keamanan informasi	1	Meningkatnya capaian kinerja pengamanan informasi pemda dalam status baik	IK: Persentase capaian kinerja pengamanan informasi pemda dalam status baik	1	Terlaksananya kegiatan strategis yang diamankan	Ik: Persentase kegiatan strategis yang diamankan
						2	Terpenuhinya titik yang diamankan pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemda berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	IK: Persentase titik yang diamankan pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemda berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi

Kinerja Urusan/ Sub Urusan				Kinerja Taktikal		Kinerja Operasional		
4	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Diskominfo	IK: Peningkatan kategori nilai SAKIP Diskominfo	1	Meningkatnya nilai SAKIP Diskominfo	IK: Peningkatan nilai SAKIP Diskominfo	1	Terlaksananya perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	IK: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun
						2	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	IK: Jumlah dokumen administrasi keuangan
						3	Tersusunnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	IK: Jumlah dokumen administrasi BMD perangkat daerah
						4	Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah	IK: Jumlah dokumen administrasi umum PD
						5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemda	IK: Jumlah dokumen jasa penunjang urusan PD
						6	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	IK: Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda

Tabel 2. Kinerja Taktikal dan Kinerja Operasional

Kinerja Operasional			Kinerja Sub Operasional		
1	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	IK: Indeks kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	1	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	IK: Jumlah dokumen kebijakan teknis bidang informasi dan kounikasi publik
			2	Tersusunnya dokumen monitoring opini dan aspirasi publik	IK: Jumlah dokumen monitoring opini dan aspirasi publik
			3	Tersusunnya dokumen monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda	IK: Jumlah Dokumen Pelaksanaan pengadministrasian BMD pada PD yang disusun
			4	Tersusunnya dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan	IK: Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan
			5	Tersusunnya dokumen pengelolaan media komunikasi publik	IK: Jumlah media komunikasi publik
			6	Terselenggaranya hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas	IK: Jumlah kegiatan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemda kabupaten	IK: Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo	1	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo	IK: Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo
			2	Meningkatnya jumlah sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan penatalaksanaan dan pengawasan	IK: Jumlah sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan penatalaksanaan dan pengawasan

Kinerja Operasional			Kinerja Sub Operasional		
			3	Terkelolanya sistem jaringan intra pemerintah daerah	IK: Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah
2	Meningkatnya pengelolaan e-government di lingkup Pemkab	IK: Jumlah sumber daya teknologi informatika dan layanan e-government oleh OPD	1	Terkelolanya pusat data Pemkab	IK: Jumlah cakupan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah
			2	Optimalnya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	IK : Jumlah layanan berbasis elektronik dalam Smart City
			3	Terselenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah	IK: Jumlah sistem penghubung layanan pemerintah yang diselenggarakan
			4	Optimalnya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	IK: Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan
			5	Optimalnya pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemda	IK: Cakupan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
1	Terpenuhinya basis data statistik daerah yang terintegrasi sesuai standar data	IK: Persentase basis data statistik daerah yang terintegrasi sesuai standar data	1	Tersedianya data daerah dalam angka (profil daerah)	IK : Jumlah Dokumen untuk penyusunan data daerah dalam angka
			2	Terselenggaranya survei statistik sektoral yang dilakukan	IK : Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan
			3	Tersedianya bahan acuan pendukung kegiatan statistik	IK : Dokumen bahan acuan pendukung kegiatan statistik
			4	Tersedianya dokumen kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	IK : Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral
			5	Terfasilitasinya kelembagaannya statistik sektoral	IK : Jumlah PD yang mendapatkan pelatihan kelembagaan statistik sektoral
1	Terlaksananya kegiatan strategis yang diamankan	IK: Persentase kegiatan strategis yang diamankan	1	Tersedianya dokumen sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit	IK : Jumlah sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah

Kinerja Operasional			Kinerja Sub Operasional		
			2	Terpenuhinya dokumen kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda kabupaten	IK: Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda yang ditetapkan
			3	Terlaksananya keamanan informasi pemda kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik	IK: Persentase sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen yang menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian
2	Terpenuhinya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten	IK: Persentase titik yang diamankan pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemda berdasarkan PHKS	4	Meningkatnya kualitas operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemkab	IK: Dokumen operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemkab
1	Terlaksananya perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	IK: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	IK: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
			2	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	IK: Jumlah RKA-SKPD
			3	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	IK: Jumlah RKAP/ DPPA
			4	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	IK: Jumlah dokumen DPA-SKPD
			5	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA	IK: Jumlah dokumen DPPA-SKPD
			6	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	IK: Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
			7	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	IK: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah

Kinerja Operasional			Kinerja Sub Operasional		
2	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	IK: Jumlah dokumen administrasi keuangan	1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	IK: Jumlah dokumen penerimaan gaji dan tunjangan ASN
			2	Tersusunnya administrasi pelaksanaan tugas ASN	IK: Jumlah dokumen hasil penyediaan asministrasi pelaksanaan tugas ASN
			3	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	IK: Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
3	Tersusunnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	IK: Jumlah dokumen administrasi BMD perangkat daerah	1	Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah	IK: Jumlah dokumen RKBMD-SKPD
4	Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah	IK: Jumlah dokumen administrasi umum PD	1	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	IK: Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
			2	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	IK: Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
			3	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	IK: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemda	IK: Jumlah dokumen jasa penunjang urusan PD	1	Tersedianya jasa surat menyurat	IK: Jumlah laporan penyediaan surat menyurat
			2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	IK: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
			3	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	IK: Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
6	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	IK: Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan pemda	1	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	IK: Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara

B. Penetapan Kinerja Strategis Daerah (sebagai tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis dan ukuran kinerja Diskominfotiksan Kabupaten Sumbawa)

Tujuan 1	Indikator Tujuan	Target
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Persentase peningkatan nilai RB	28,70

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target (tahun n)				
1	Meningkatnya persentase data statistik sektoral daerah sesuai standar data	1	Persentase data statistik sektoral daerah sesuai standar data	80	85	90	95	100
2	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah dalam status baik	1	Indeks Pemenuhan Standar Keamanan Informasi	60	65	70	75	80
3	Meningkatnya kategori nilai SAKIP Diskominfotiksan	1	Peningkatan kategori nilai SAKIP Disominfotiksan	BB	BB	BB	BB	A

Tujuan 2	Indikator Tujuan	Target
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	83,00

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target (tahun n)				
1	Meningkatnya kualitas layanan informatika dan komunikasi publik	1	Peningkatan indeks kepuasan kualitas layanan informatika dan komunikasi publik	73,76	78	79	80	81

C. Penetapan Kinerja Taktikal (sebagai sasaran program dan kinerja Eselon III/pejabat administrator)

No.	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Program (n2)
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	Peningkatan presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%

No.	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target Program (n2)
2	Program Aplikasi Informatika	Meingkatnya kualitas layanan publik on-line terintegrasi dan perangkat daerah terhubung internet Diskominfo	Persentase layanan publik on-line terintegrasi dan perangkat daerah terhubung internet Diskominfo	66,67%
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data sesuai metadata statistik sektoral	Peningkatan persentase data sesuai metadata statistik sektoral	90%
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya kualitas kinerja pengamanan informasi Pemda dalam status baik	Persentase capaian kinerja pengamanan informasi Pemda dalam status baik	100%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnyakualitas nilai SAKIP Diskominfotiksan	Peningkatan Nilai SAKIP Diskominfotiksan	79,38

D. Penetapan Kinerja Operasional (sebagai sasaran kegiatan dan/atau kinerja Eselon IV/pejabat pengawas/pejabat fungsional)

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan (n2)
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Kualitas Layanan Komunikasi Publik	93,67
2	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas koneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfotiksan	Persentase PD yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfotiksan	100%
3	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya teknologi informatika dan layanan e-government oleh PD	Persentase pemanfaatan sumber daya teknologi informatika dan layanan e-government oleh PD	66,66%
4	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas data sesuai metadata statistik sektoral	Peningkatan persentase data sesuai metadata statistik sektoral	100%
5	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Meningkatnya kualitas kegiatan strategis yang diamankan	Persentase kegiatan strategis yang diamankan	100%

No.	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan (n2)
	Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
6	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas titik yang diamankan pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase titik yang diamankan pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	65%
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	10
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	9 Dok
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi BMD-PD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD-PD	3 Dok
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	4 Dok
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum PD yang disusun	3 Dok
12	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD yang disusun	7 Dok

E. Penetapan Kinerja Sub Operasional (sebagai sasaran subkegiatan dan kinerja jabatan fungsional)

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan (n2)
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	3 Dok
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Opini	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3 Dok

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan (n2)
		dan Aspirasi Publik		
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dok
4	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dok
5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tersedianya Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 Dok
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Dok
7	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan penatalaksanaan dan pengawasan	1 Nama domain dan 31 Sub domain
8	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Sistem
9	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok
10	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersusunnya Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dok

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan (n2)
11	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit
12	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dok
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 PD
14	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	7 Aplikasi
15	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan
16	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Meningkatnya cakupan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	Cakupan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas	100%
17	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan (n2)
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya data daerah dalam angka (profil daerah)	Tersedianya data daerah dalam angka (profil daerah)	1 Dok
19	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tersusunnya laporan pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas pengelolaan statistik sektoral pemerintahan daerah	1 Lap
20	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Dokumen Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral	1 Dok
21	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31 PD
22	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya dokumen otorisasi statistik sektoral	Jumlah dokumen otorisasi statistik sektoral	1 Dok
23	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dok
24	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sitem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sitem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian	1 Sistem
25	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Terlaksananya Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah	1 PD

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan (n2)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	
26	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	25 PD
27	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dok
28	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok
29	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok
30	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok
31	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok
32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Dok

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan (n2)
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
33	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	3 Lap
34	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dok
35	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dok
36				
37	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok
38	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok
39	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen RKBMD-SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD-SKPD	1 Dok
40	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	1 Lap
41	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	1 Lap
42	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	1 Dok
43	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersusunnya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50 Unit

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan (n2)
44	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok
45	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok
46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
47	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap
48	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Lap
49	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok
50	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	1 Dok
51	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	3 Dok
52	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 Surat
53	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	1 Lap
54	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Lap

No.	Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan (n2)
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
56	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit
57	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	4 Unit

BAB V PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman atau rujukan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah baru dapat dinyatakan baik dan tepat jika penyelenggara pemerintahan di daerah telah mampu menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satu indikator bahwa suatu tugas dan fungsi suatu instansi pemerintahan dapat terselenggara dengan baik adalah tersusunnya Penjenjangan Kinerja, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.

Pilihan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 ini akan mempengaruhi kontribusi indikator beserta target. Dalam proses penyusunan Penjenjangan Kinerja Diskominfo Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini telah memperhatikan sejumlah dokumen lainnya seperti Renstra Diskominfo Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan Renja Diskominfo Kabupaten Sumbawa Tahun 2023. Hal tersebut sebagai upaya mengsinkronisasikan seluruh dokumen.

Kami selalu berikhtiar, untuk senantiasa mengoptimalkan seluruh sumber daya pada Diskominfo Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, untuk memenuhi seluruh target tiap indikator pada tiap jenjang, sehingga persoalan dan hambatan yang berpotensi dinamis pada Tahun 2023 tetap dapat tertangani. Demikian dokumen penjenjangan Kinerja Diskominfo Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini kami susun, teriring harapan semoga kami dapat berkinerja baik sehingga seluruh target yang direncanakan dapat tercapai untuk berkontribusi dalam mewujudkan Sumbawa yang gemilang dan berkeadaban.

Semoga Allah *Subhaanahuwaata'aala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua.

Sumbawa Besar, 20 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa

